



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KOTA BIMA

TAHUN ANGGARAN 2024



Pemerintah Kota Bima
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



BERANDA PROFIL INFORMASI JENIS LAYANAN GALLERY DOWNLOAD PENANAMAN MODAL LAYANAN ONLINE TERPADU SP4N LAPOR HUBUNGI KAMI



dpmptsp

Kota Bima

Jl. Gajah Mada No.10 Kel Pane Kec. Rasane
Barat Kota Bima - NTB

TAHUN
2025



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah S.W.T . Kami sampaikan karena atas ijin Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima Tahun 2024 selesai disusun. LKIP disusun sebagai langkah dari tatakelola kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah Kota Bima melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk dari pengangkatan Status Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Bima oleh Pemerintah Kota Bima melalui Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kota Bima yang diperkuat dengan Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi serta tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima, dengan melaksanakan 1 (Satu) Kinerja Utama yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Investasi, berdasarkan SK Kepala DPMPTSP Nomor : 500.16 / 21 /DPMPTSP/I/2023 Tentang Penetapan Hasil Reviuw Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima.

Segala upaya dan pengerahan sumber daya telah dilakukan dalam mewujudkan Visi dan melaksanakan misi-misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima dan LKIP 2024 adalah wujud dari pertanggung jawaban kami tentang semua itu.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya LKIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima Tahun 2024 ini, dan tidak lupa pula kami meminta maaf atas berbagai kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk mendukung pencapaian kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.

Kota Bima, Februari 2025
Kepala Dinas



H. LALU SUKARSANA, S.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 196607041986081003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
1. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
2. KONDISI ORGANISASI	2
B. TUGAS POKOK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BIMA	3
1. TUGAS	3
2. FUNGSI	3
C. ASPEK STRATEGIS ORGASASI	7
D. PERMASALAHAN UTAMA/ISSUE STRATEGIC YANG DIHADAPI	7
E. SUMBER DAYA	8
F. STRUKTUR ORGANISASI	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. PERENCANAAN KINERJA JANGKA MENENGAH (RENCANA STRATEGIS)....	11
B. PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	15
C. PERJANJIAN KINERJA	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	22
1. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI	23
2. MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR	28
3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS NASIONAL	35
4. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR	



NASIONAL	36
5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN	38
6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	39
7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN CAPAIAN PERNYATAAN KINERJA	43
B. REALISASI ANGGARAN	49
BAB IV PENUTUP	53



DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1 Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Eselonering	10
Tabel. 1.2 Data Menurut Golongan/Ruang	10
Tabel. 2.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP	11
Tabel. 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi DPMPTSP	12
Tabel. 2.3 Program dan Kegiatan DPMPTSP	13
Tabel. 2.4 Penetapan Indikator Kinerja Berdasarkan Renstra	15
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja	17
Tabel 3.1 Skala Nilai Perangkat Kinerja	22
Tabel 3.1.1 Tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran dari hasil capaian indikator kinerja Tahun 2024.....	23
Tabel 3.1.2 Tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan program dan kegiatan tahun 2024	24
Tabel.3.2.1 Pengukuran Meningkatnya Investasi Daerah (Realisasi Investasi).....	28
Tabel 3.2.2 Rekapitulasi Nilai Investasi Pelaku usaha di Kota Bima	29
Tabel 3.2.3 Pengukuran Kinerja IKM	33
Tabel 3.2.4 Nilai Persepsi untuk IKM.....	35
Tabel 3.2.5 Rekapitulasi pencapaian indikator utama untuk IKM.....	35
Tabel 3.3.1 Evaluasi keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran.....	36
Tabel 3.6.1 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	40
Tabel 3.6.2 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya beserta program / kegiatannya	40
Tabel 3.7.1 Capain Kinerja Eselon II	43
Tabel 3.7.2 Capain Kinerja Eselon III	44
Tabel 3.7.3 Capain Kinerja Eselon IV	45
Tabel 3.7.4 Capain Kinerja Jabatan Fungsional.....	46
Tabel 3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Bima	9
Gambar 3.2.1 Rekapan sebaran NIB, sertifikat standar terbit otomatis.....	30
Gambar 3.2.2 Rekapan realisasi investasi berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Kota Bima.....	31



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.2.1 Realisasi Nilai Investasi	30
Grafik 3.2.2 Realisasi IKM	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ditetapkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88); serta Peraturan Walikota Bima Nomor 81 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 713), yang mempunyai Tugas kewenangan Daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan sebagaimana pada visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pada Renstra 2018-2023.

Dalam melaksanakan fungsi kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP telah menerapkan dan melaksanakan RPJM, RKPD serta Renja sesuai dengan Perubahan Renstra 2014-2018 (Renstra Tahun kedua), termasuk kinerja yang berkaitan dengan SPM yang telah dilaporkan sesuai target BKPM atau Kementerian Investasi.

Untuk memenuhi rencana kerja yang telah ditetapkan terutama yang berhubungan dengan investasi dan pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP terdapat program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama lima tahun dan kinerja tahunan. Untuk kinerja kegiatan capaian program harus terjabarkan dalam LKIP sehingga akan dapat diketahui dari target dan capaian kinerja tahun berjalan. Laporan kinerja berisikan rencana, target, capaian dan realisasi terhadap pengelolaan keuangan perangkat Daerah (PD) sehingga dari capaian tersebut dapat terukur dan terevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, maka setiap akhir tahun anggaran untuk menyampaikan laporan akuntabilitas keuangan kepada pemerintah daerah (Walikota).

1. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuat laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Permenpan nomor 53 tahun 2014 adalah sebagai Sebagai salah satu pertanggung jawaban Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan serta kebijakan-kebijakan yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh setiap perangkat Daerah (PD).

Adapun tujuan dari laporan kinerja instansi pemerintah ini adalah melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam rangka mengimplementasikan kinerja yang telah ditetapkan dalam bentuk program dan kegiatan sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian dan kekurangannya untuk dievaluasi. sehingga menjadi dasar bagi peningkatan kegiatan untuk tahun yang akan datang disamping untuk informasi bagi masyarakat yang memerlukan.

2. Kondisi organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ditetapkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88); serta Peraturan Walikota Bima Nomor 81 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 713), Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima mempunyai Tugas membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu .

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu terdapat peraturan walikota bima nomor 76 tahun 2021 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bima.

B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BIMA.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 81 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 713), Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima mempunyai Tugas membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Adapun Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima sebagai Berikut :

1. TUGAS

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima mempunyai Tugas membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

2. FUNGSI

Berdasarkan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;

Sekretaris

1. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
 - b. pengelolaan urusan keuangan;
 - c. pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
 - d. pengelolaan urusan ASN; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Sekretariat membawahi dan mengoordinasikan:
 - a. Subbagian Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
- b. melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang barang milik daerah;
- c. melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang ketatausahaan;
- d. melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- e. melaksanakan kegiatan urusan pengelolaan keuangan lingkup Dinas; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Kelompok Jabatan Fungsional

Substansi Penanaman Modal

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/ kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; dan
- l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang berjenjang tertinggi dan senioritas.

Kelompok Jabatan Fungsional

Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. pelaksanaan analisis dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan; dan
- h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang berjenjang tertinggi dan senioritas.

Unit Pelaksana Teknis

- a. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas, Unit Pelaksana Teknis dapat dibentuk sesuai kebutuhan.
- b. Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi promosi dan penggalian potensi, pengendalian, perizinan dan melakukan kajian untuk regulasi-regulasi yang berkaitan dengan paket insentif dan kemudahan berusaha sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila dimulai dengan perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek

Rencana Strategis merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang diperhatikan adalah Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Rencana Strategis meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran yang berupa Kebijakan, Program dan Kegiatan dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

D. PERMASALAHAN UTAMA/ISSUE STRATEGIC YANG DIHADAPI

Beberapa permasalahan utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA), Peluang investasi yang dipromosikan belum menggambarkan permintaan pasar yang membuat calon investor tertarik berinvestasi di Kota Bima.

2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA), Kurang optimalnya pengawasan kegiatan penanaman modal karena belum semua investor membuat laporan LKPM melalui Kepala DPMPTSP dan LKPM secara online.
3. Rasio daya serap tenaga kerja yang ada di Kota Bima
4. Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah).
5. Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)
6. Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung terhadap perkembangan sistem pelayanan perizinan secara online.
7. Implementasi terkait Mal Pelayanan Publik (MPP) kota bima.

E. SUMBER DAYA

Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah Kota Bima terletak di Jalan Gajah Mada No.10, Kel. Pane Kec. Rasanae Barat Kota Bima. Kebutuhan ruangan kerja masih belum memadai sesuai tuntutan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi sehingga dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas. Selain itu, ruang pertemuan, ruang pelayanan dan ruang kantor yang memadai dan representatif untuk mendukung kelancaran operasional tugas Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota bima.

Fasilitas perkantoran yang dimiliki oleh DPMPTSP Kota Bima sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

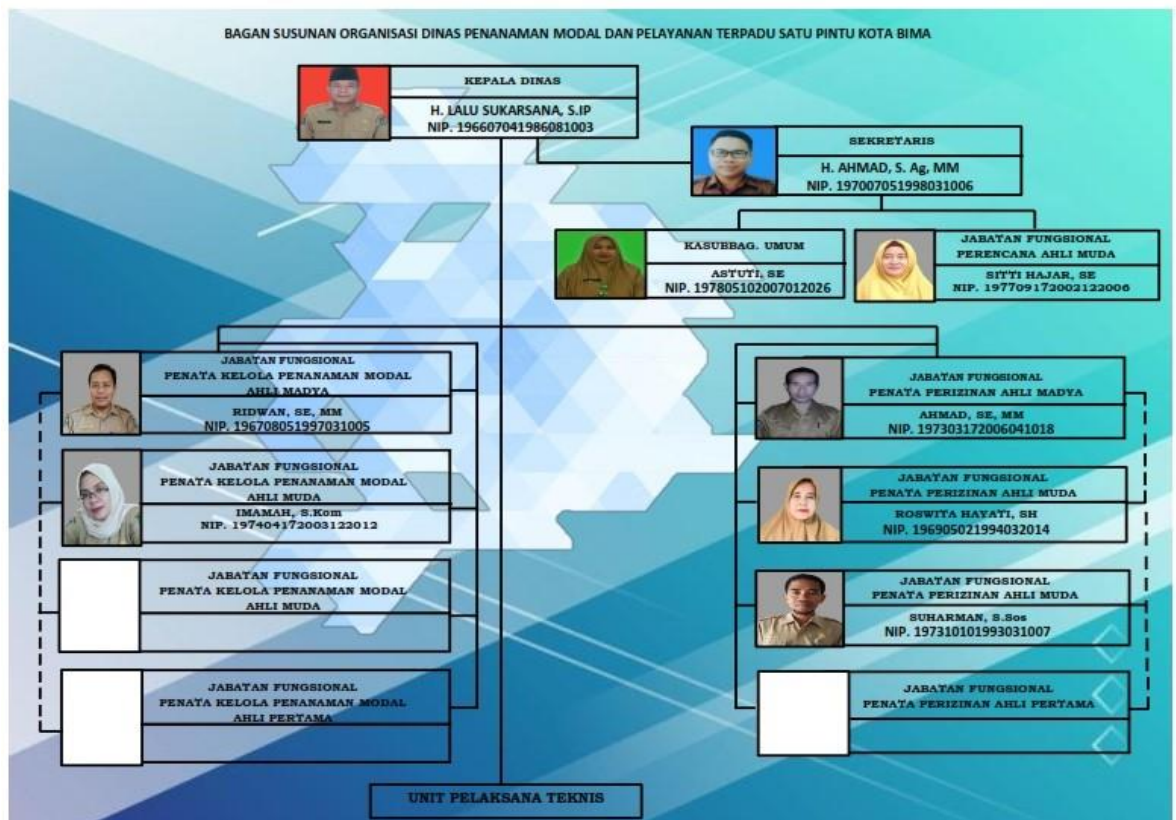
1. Mebeleur, antara lain berupa meja, kursi, rak buku, dan lemari;
2. Fasilitas Komunikasi, berupa jaringan telepon, jaringan I nternet, dan mesin faksimili;
3. Perangkat komputer (laptop) untuk mendukung kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis perencanaan, dilengkapi dengan ketersediaan printer, plotter, dan server;
4. Peralatan pendukung pekerjaan, seperti kamera digital, GPS, mesin tik, dan LCD proyektor;
5. Perlengkapan elektronik lain yang mendukung kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan, seperti lemari es, air conditioner (AC), dispenser, kipas angin, dan televisi;
6. Kendaraan dinas berupa mobil dan sepeda motor.

F. STRUKTUR ORGANISASI

Adapun Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Bima sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Koordinator Jabatan Fungsional Penanaman Modal dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal.
- d. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis

Gambar 1. Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Bima



Data Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

Jumlah pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Bulan Desember 2024 adalah sebanyak 23 Orang ASN, 3 Orang P3K, 3 Orang Honorer K-II, 16 Orang PTT (Sukarela).

Pegawai berdasarkan kedudukan dalam organisasi

1. Menurut Jabatan/Eselon

Tabel 1.1. Data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Eselonering

No	Eselon	Jenjang Pendidikan				Jumlah Pegawai
		SMA	D3/D2/D1	S1	S2	
1	Eselon II	0	0	1	0	1
2	Eselon III	0	0	0	1	1
3	Eselon IV	0	0	1	0	1
4	Non Eselon	2	0	19	2	23
	Jumlah					26

2. Menurut Golongan/Ruang

Tabel 2.2 Data Menurut Golongan/Ruang

No	Pendidikan	Golongan				Jumlah Pegawai
		I	II	III	IV	
1	S2	0	0	0	3	3
2	S1	0	0	21	0	21
3	D3/D2/D1	0	0	0	0	0
4	SMA	0	2	0	0	2
5	SMP	0	0	0	0	0
6	SD	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	2	21	3	26

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA JANGKA MENENGAH (RENCANA STRATEGIS)

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra-PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang hendak dilakukan. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud di atas, dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD, dengan VISI Pemerintah Kota Bima : Misi ke1 : Mewujudkan Kota Bima Yang Sejahtera, Maju dan Mandiri pada Tahun 2028 “Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan masyarakat dan Berikut keterkaitan antara RPJMD dan Indikator kinerja pemerintah dengan Indikator DPMPTSP Kota Bima, dengan tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima

sesuai KEPMENDagri 050_5889 tahun 2021 telah disesuaikan dengan Kepmendagri baru_Nomor_900.1.15.5-1317_Tahun_2023

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja tujuan dan sasaran	Kondisi awal kinerja		Target capaian			Kondisi akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan PDRB	Meningkatnya Investasi Daerah (Realisasi Investasi)	-	Rp. 200.00 0.000. 000,-	Rp. 220.00 0.000. 000,-	Rp. 242.00 0.000. 000,-	Rp. 266.20 0.000. 000,-	Rp. 266.200.000. 000,-
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-Rata Skor IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	92,86	92,87	92,88	92,89	92,89

Arah Kebijakan

Strategi yang sudah dirumuskan sebagaimana disajikan pada bagian sebelumnya, lebih lanjut dijabarkan kedalam arah kebijakan pembangunan tahunan dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan dan penekanan yang berbeda tiap tahunnya, namun tetap berkesinambungan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Namun demikian pada permasalahan-permasalahan tertentu tidak diberlakukan penekanan yang berbeda pada setiap tahunnya disebabkan oleh pelaksanaannya harus dilakukan secara berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Bima juga mengacu kepada hasil meningkatnyakualitas pelayanan public serta meningkatnya nilai investasi kota bima, untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan. rencana dan program pembangunan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima terhadap berbagai aspek dan komponen Pelayanan Publik untuk kemudian diintegrasikan dengan visi, misi kepala daerah.

Tabel. 2.2

Tujuan, Sasaran Strategi DPMPTSP Tahun 2024-2026

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target		
					2024	2025	2026
1	Misi ke1 : Mewujudkan Kota Bima Yang Sejahtera, Maju dan Mandiri pada Tahun 2028	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan PDRB	Meningkatnya Investasi Daerah (Realisasi Investasi)	Rp. 220.000.00 0.000,-	Rp. 242.000.0 00.000,-	Rp. 266.200.00 0.000,-
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-Rata Skor IKM	Indeks Kepuasaaan Masyarakat (IKM)	92,87	92,88	92,89

Program/Kegiatan

Berikut ini merupakan rekapitulasi anggaran berdasarkan Program kegiatan yang ada di Dinas Penanaman modal dan PTSP Tahun 2024.

Tabel 2.3. Program dan Kegiatan DPMPTSP

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		5.732.935.749,00
a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		102.884.200,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.802.100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.161.000,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.502.500,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.121.700,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.857.200,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.464.000,00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.975.700,00
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.032.472.599,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.909.138.199,00
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	108.947.500,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.530.700,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.856.200,00
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah		433.758.300,00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.164.000,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.715.000,00
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.647.300,00
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330.232.000,00
d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		536.035.550,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	158.863.800,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	377.171.750,00

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		59.300.000,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.000.000,00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.300.000,00
B. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		57.481.100,00
f. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		57.481.100,00
1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	57.481.100,00
C. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		1.302.588.500,00
g. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		1.302.588.500,00
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1.268.705.400,00
2	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultansi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	19.677.100,00
3	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	14.206.000,00
D. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		133.924.000,00
h. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		133.924.000,00
1	Pengawasan Penanaman Modal	133.924.000,00
E. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		74.491.500,00
i. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		74.491.500,00
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	74.491.500,00



B. PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja daerah memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja sasaran Visi Misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui ketercapaian visi dan misi RPD Tahun 2024-2026.

Tabel 2.4. Penetapan Indikator Kinerja Utama

*Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kota Bima Nomor 500.16 / 21 /Dpmptsp/I/2023
Tentang Penetapan Hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Bima*

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA	URAIAN DAN FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Investasi dan Jumlah Pelaku Usaha	Realisasi Investasi	Laporan Realisasi Investasi	untuk memperoleh persentase peningkatan Nilai Investasi PMDN/PMA sebagai berikut : $= \frac{\text{Jumlah Realisasi Investasi thn N} - \text{Jumlah Realisasi Investasi thn N-1}}{\text{Jumlah Realisasi Investasi tahun N-1}} \times 100 \%$	Kepala Dinas
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan IKM	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Laporan indeks kepuasan Masyarakat	untuk memperoleh persentase laporan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut : $\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Kepala Dinas



- Definisi Operasional Realisasi Investasi adalah data yang diambil dari hasil pencatatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh Penanam Modal secara daring, atas kegiatan usaha yang dijalankan berdasarkan perizinan berusaha baik PMA maupun PMDN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara publik.

Maksud penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima adalah untuk mengetahui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan gambaran terhadap kualitas pelayanan publik terkait penyelenggaraan pelayanan administrasi perzinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.

Adapun tujuan dilaksanakannya penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima adalah untuk mengukur sampai sejauh mana kecenderungan masyarakat selaku pengguna jasa pada saat memperoleh layanan publik dan mengukur sampai sejauh mana pula kinerja aparatur sebagai pelayan publik.

C. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabilitas dan beroreantasi kepada hasil, perlu disusun Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai tahun 2024.

Penetapan Kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala PD dengan Kepala Daerah dan merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi dalam akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2024 sebagai wujud penilaian kinerja antara Kepala PD dengan Kepala Daerah, Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja tahunan yang perlu dilaksanakan oleh pimpinan seluruh aparatur DPMPTSP karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang berdaya guna bagi kepentingan masyarakat.

Dengan Perencanaan Kinerja tersebut diharapkan DPMPTSP fokus dan terarah dalam mengelolah program/kegiatan. Penyusunan Penetapan Kinerja tahun 2024 mengacu pada RPJMD Tahun 2024-2029. Dokumen Rencana Kinerja Pemerintah (RKPD) tahun 2023, dokumen rencana strategis tahun 2024-2029, dokumen Rencana kerja (RENJA) DPMPTSP tahun 2024 dan DPA DPMPTSP Tahun 2024. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan sumber daya yang ada.

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja

1. Kepala Dinas

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. Meningkatnya investasi dan jumlah pelaku usaha	1. Realisasi Investasi	200M
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan IKM	2. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	92,86



2. Sekretaris

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
1		2		3
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.	Persentase peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
2.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan	2.	Persentase peningkatan Administrasi Keuangan	100 %
3.	Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Umum	3.	Porsentase Capaian Pelayanan Administrasi Umum	100%
4.	Meningkatnya kualitas Pengadaan peralatan dan Perlengkapan kantor	4.	Persentase Peningkatan Pengadaan peralatan dan Perlengkapan kantor	100%
5.	Meningkatnya penyediaan jasa dalam menunjang kebutuhan kantor	5.	Persentase peningkatan penyediaan jasa dalam menunjang kebutuhan kantor	100%
6.	Meningkatnya kualitas pemeliharaan Barang milik daerah	6.	Persentase peningkatan pemeliharaan Barang milik daerah	100%

a. Perencana Ahli Muda

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
1		2		3
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
2.	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
3.	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
4.	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	4.	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
5.	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5.	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen

6.	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan
7.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan

b. Kasubbag Umum

N0	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang/bulan
2.	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
3.	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
4.	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan
5.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket
6.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket
7.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	7.	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
8.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen
9.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan
10.	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	10.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit
11.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
12.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
13.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit
14.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit
15.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit

3. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	1	2	3
1.	Meningkatnya Realisasi Usaha yang berizin	1. Persentase Peningkatan Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	100%
2.	Meningkatnya penerima fasilitas insentif	2. Porsentase peningkatan nilai investasi	persen
3.	Meningkatnya kerjasama investasi	3. Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	100%
4.	Meningkatnya Realisasi Investasi	4. Persentase Pelaku Usaha yang Telah Melaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	100%

Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1. Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8 Dokumen

a. Plt Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen
2.	Terlaksananya Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	3. Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	231 kegiatan usaha



4. Penata Perizinan Ahli Madya

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
1		2		3
1.	Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Penanaman Modal	1.	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	100%

a. Penata Perizinan Ahli Muda

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1.	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku usaha

b. Penata Perizinan Ahli Muda

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1.	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	1.	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2000 Kegiatan Usaha

c. Plt Penata Perizinan Ahli Muda

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1	Tersedianya Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25 Pelaku Usaha

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan pada pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara priodik.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Interval Nilai realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Bahwa pada Tahun 2024 jumlah sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 2 (Dua) sasaran dengan 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama dengan rata-rata pencapaian diatas 100%, dimana dari sasaran masuk kategori Sangat Tinggi (Berhasil).

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realsasi capaian}}{\text{Target}} \times 100\%$$

1. MEMBANDINGKAN ANTARA TERGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Bahwa pada Tahun 2024 jumlah sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 2 (Dua) sasaran dimana sasaran tersebut masuk kategori berhasil sebagaimana tersaji pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.1. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran dari hasil capaian indikator kinerja Tahun 2024

No	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran Strategis/Hasil Program)	Indikator Kinerja	Interval Nilai realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Capaian
1	Meningkatnya Investasi dan Jumlah pelaku usaha	Realisasi Investasi	Rp. 200 M	Rp. 205.654.855.244	103 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan IKM	IKM (Indeks kepuasan Masyarakat)	92,86	91,86	99 %



Dari tabel diatas dapat dijelaskan lebih rinci terkait pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran dari capaian indikator kinerja berdasarkan program dan kegiatan tahun 2024, berikut disajikan dalam tabel :

Tabel. 3.1.2. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran dari hasil capaian indikator kinerja berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2024

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Targ et	Realis asi	Program/Sub. Kegiatan	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Meningkatny a Investasi dan jumlah pelaku usaha	Realisasi Investasi	Rp. 200.000.000,00	Rp. 205.654.855,24	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Ko ta	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
							Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Dokumen	-	0 %
					PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provin si dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	0	0%



							Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	kegiatan	0	0%
						Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0 %
							Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0 %
					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi	231 Kegiatan Usaha	138 kegiatan usaha	60 %



								Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha			
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan IKM	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	92,86	91,68	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	2198 Pelaku Usaha	220 %
							Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2000 kegiatan Usaha	5211 Kegiatan Usaha	261 %
							Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan	25 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	8 %



								Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			
							Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Dokumen	0	0 %
					PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8 Dokumen	8 D o k u m e n	100 %

Dari Tingkat Pencapaian masing-masing Indikator Kinerja Sasaran dari hasil capaian indikator kinerja berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2024, ada beberapa program/ kegiatan yang tidak mencapai target 100% yakni pada kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko dari target 25 Pelaku Usaha tetapi yang terealisasi hanya 2 Pelaku Usaha dengan capaian kinerja sebesar 8 %, tidak mencapai target karena sudah banyak pelaku usaha yang tidak mengalami kendala dalam pengurusan izin usaha.

2 MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Pencapaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima yang dicerminkan dalam Capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

a. Meningkatnya Investasi dan Jumlah Pelaku Usaha (Realisasi Investasi)

Tolok ukur capaian kinerja sasaran “Meningkatnya pertumbuhan investasi” dengan indikator sasaran : Meningkatnya investasi dan jumlah pelaku usaha (realisasi Investasi) :

$$= \frac{\text{Jumlah Realisasi Inves PMDN/PMA tahun N} - \text{Jumlah Realisasi Nilai Inv tahun N-1} \times 100\%}{\text{Jumlah Realisasi Invest tahun N-1}}$$

Tabel. 3.2.1 Pengukuran Meningkatnya Investasi Daerah (Realisasi Investasi)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Porsentase	Target	Realisasi	Porsentase
1	2	3	4	5	$\frac{6}{5/4 \times 100}$	7	8	$\frac{9}{8/7 \times 100}$
1	Meningkatnya Investasi dan jumlah pelaku usaha	Realiasi Investasi	Rp. 200.000.000.000,-	Rp.382.272.100.59	192 %	Rp.200.000.000.000,-	Rp. 205.654.855.244,-	103%



BERIKUT DATA NILAI INVESTASI TAHUN 2018, 2019 DAN TAHUN 2020,2022,2023 BERDASARKAN NILAI INVESTASI PELAKU USAHA YANG ADA DIKOTA BIMA

Tabel. 3.2.2 Rekapitulasi Nilai Investasi Pelaku Usaha di Kota Bima

No	Jumlah Nilai Investasi tiap Bulan nya	Tahun 2018 Dalam (Rp)	Tahun 2019 Dalm (Rp)	Tahun 2020 Dalam (Rp)	Tahun 2021 dalam (Rp)	Tahun 2022 Dalam (Rp)	Tahun 2023 Dalam (Rp)
1	Januari	1.324.200.000	5.634.000.000	14.187.000.000	1.010.311.000.000	10.996.000.000	Rp6.062.000.000
2	Februari	6.703.000.000	25.363.000.000	12.230.000.000	14.055.000.000	13.940.000.000	Rp10.703.010.000
3	Maret	7.972.500.000	11.786.000.000	18.707.000.000	33.353.891.000	12.007.700.000	Rp2.942.000.037
4	April	6.685.000.000	15.515.000.000	12.322.770.806	18.656.290.200	11.723.885.403	Rp8.250.000.000
5	Mei	8.480.000.000	12.214.000.000	5.250.000.000	5.045.000.000	9.560.000.000	Rp3.441.000.000
6	Juni	3.503.000.000	32.801.891.000	40.405.000.001	10.850.000.000	16.875.000.000	Rp8.345.000.000
7	Juli	7.852.000.000	6.670.000.000	117.034.000.000	6.570.000.000	17.450.000.000	Rp17.521.093.278
8	Agustus	7.705.000.000	16.790.000.000	10.980.000.000	2.812.000.000	9.320.000.000	Rp4.990.000.000
9	September	4.709.000.000	24.202.093.278	8.940.000.000	5.295.000.000	10.794.000.000	Rp6.650.000.000
10	Oktober	41.702.500.000	26.925.000.000	13.141.000.000	5.380.000.000	7.722.000.000	Rp3.340.000.000
11	November	63.410.397.742	19.025.500.000	34.382.000.000	3.800.000.000	7.231.000.000	Rp3.700.000.000
12	Desember	16.841.800.000	24.960.093.278	4.835.500.000	5.098.000.000	58.719.123.996	Rp4.111.800.000
	Jumlah Total Investasi	176.888.397.742	221.886.577.556	292.414.270.807	1.121.226.181.200	186.338.709.399	Rp80.055.903.315

Sumber data laporan perizinan DPMPTSP

Berikut disajikan Grafik Realisasi Nilai Investasi :

Grafik 3.2.1. Realisasi Nilai Investasi

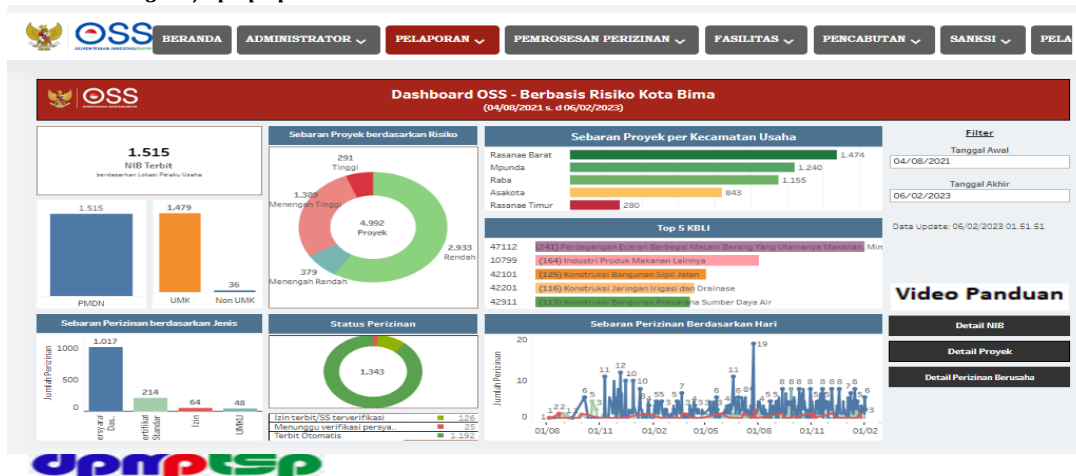


Indikator Kinerja Meningkatnya Nilai investasi selalu berbarengan dengan jumlah investor yang melaksanakan kegiatan usaha tersebut, berbagai macam jenis usaha yang telah terangkum dalam database aplikasi OSS, beserta lokasi usaha tersebut , lebih jelasnya akan ditampilkan dalam gambar dibawah ini :

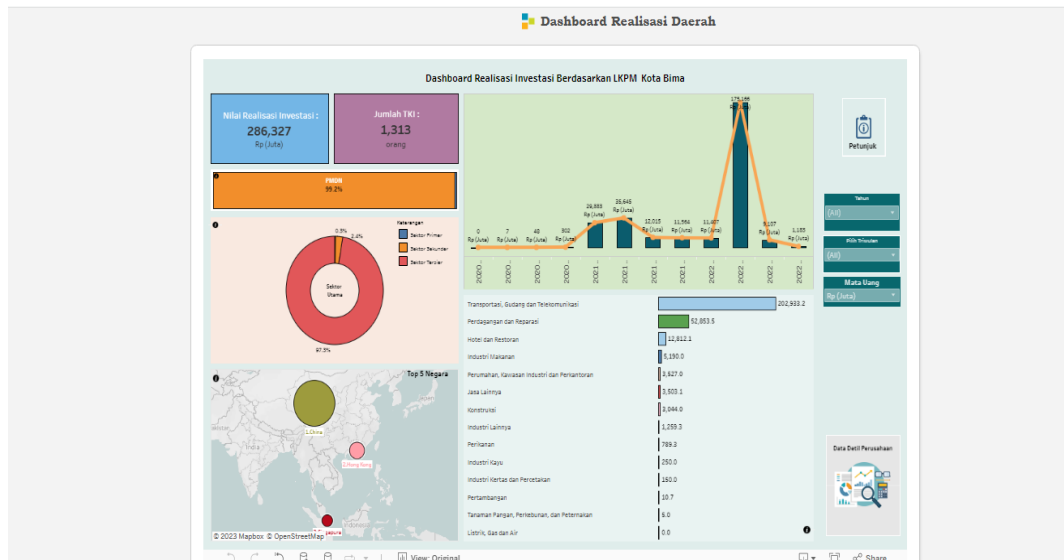
Data yang ditampilkan pada aplikasi OSS Veris 1.1 dan Aplikasi Onlines Single Submission mengikuti perubahan versi yakni dari versi 1.1 menjadi OSS-RBA (Berbasis resiko) mulai agustus 2021 sesuai dengan UU No.10 tentang Cipta Kerja , jadi data yang kami tampilkan dari Agustus 2021 sebagai berikut :

Gambar 3.2.1. Rekapitan Sebaran NIB, Sertifikat standar terbit otomatis, Sertifikat standar diverifikasi dan Izin yang diverifikasi oleh OPD teknis Pada Aplikasi OSS Versi Berbasis Resiko sebagai berikut :

Sumber : oss.go.id/Dpmpptsp kotabima



Gambar 3.2.2. Rekapitan Realisasi Investasi berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Kota Bima



Sumber : <https://nswi.bkpm.go.id/Dpmptsp Kotabima>

Realisasi tersebut dicapai melalui 5 program dan 6 kegiatan antara lain :

1. Program Promosi Penanaman Modal
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota dengan realisasi 1 dokumen dengan capaian 100 %
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Tidak ada anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan ini.
3. Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal
 - a. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Sub Kegiatan Pengawasan penanaman modal dari target 231 kegiatan usaha dengan realisasi 138 kegiatan usaha dengan capaian 60%
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - a. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

dengan Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan realisasi sebesar 220% , terdiri dari :

- a. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik dengan realisasi sebanyak 2.198 pelaku usaha dengan capaian sebesar 220%.
 - b. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko dengan realisasi sebanyak 5.211 jenis kegiatan usaha/Non Usaha dengan capaian 261 %.
 - c. Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko dengan realisasi 2 Pelaku Usaha, dengan capaian 8 % tidak mencapai target karena sudah banyak pelaku usaha yang tidak mengalami kendala dan masalah dalam pengurusan izin usaha.
5. Program Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
- a. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, realisasi sebanyak 8 dokumen dengan capaian 100%.
 - **Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)**
Tolok ukur capaian kinerja sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan IKM " dengan indikator sasaran :

Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

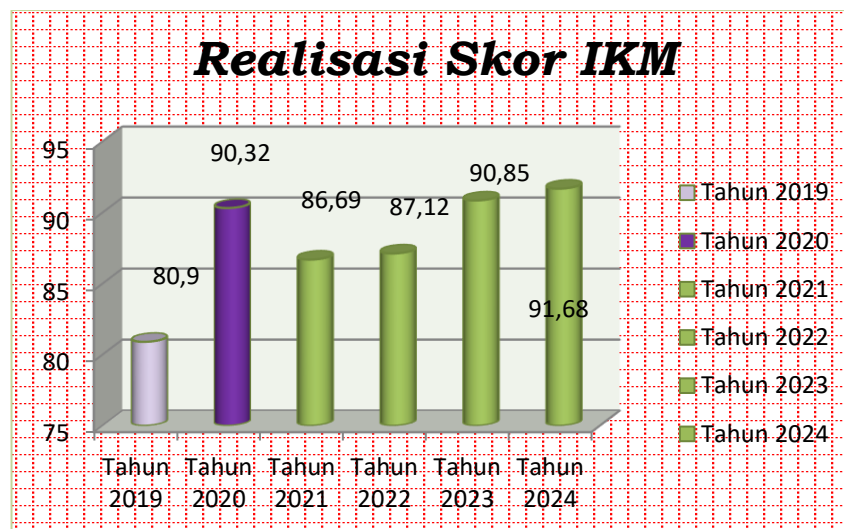
$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total Unsur yang terisi}}$$

Tabel. 3.2.3 Pengukuran Kinerja IKM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Porsentase	Target	Realisasi	Porsentase
1	2	3	4	5	$\frac{6}{5/4*100}$	7	8	$\frac{9=8/7*100}{0}$
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan IKM	IKM (Indeks Kepuasan Pelayanan)	92,86	90,85	98 %	92,86	91,68	99 %

Capaian kinerja IKM ditahun 2024 ditargetkan dengan Skor 92,86 dan terealisasi dengan Skor 91,68 atau sebesar 99 % Jika dilihat dari data tersebut capain kinerja pada tahun 2023 ternilai Tinggi karena mencapai angka 98 %, Jika dilihat dari capaian IKM dari dua tahun yang lalu, dapat dilihat memiliki variasi nilai yang berbeda-beda, karena tergantung dari penilain yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelayanan pada PTSP. Untuk itu dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 3.2.2 Realisasi IKM



Untuk mengetahui skala pencapaian Nilai IKM, berikut ditampilkan skala Nilai persepsi, Interval IKM, Intervasl Konvesri IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit PTSP.



INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
BIMA

PERIODE SEMESTER II TAHUN 2024

NILAI IKM			PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
91,68			RESPONDEN JUMLAH : 200 ORANG UMUR : 18 S/D 40 TAHUN = 98 ORANG > 40 TAHUN = 90 ORANG TIDAK MENCANTUMKAN UMUR = 12 ORANG JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI = 129 ORANG PEREMPUAN = 71 ORANG TIDAK MENYEBUTKAN JENIS KEL. = 0 ORG PENDIDIKAN : SD = 1 ORANG SMP = 3 ORANG SMA = 88 ORANG S1 = 97 ORANG S2 = 8 ORANG S3 = 0 ORANG TIDAK MENCANTUMKAN PEND = 3 ORANG PEKERJAAN : PNS = 18 ORANG TNI = 0 ORANG POLRI = 0 ORANG SWASTA = 69 ORANG WIRUSAHA = 101 ORANG LAINNYA = 5 ORANG TIDAK MENCANTUMKAN PEKERJAAN = 7 ORANG Periode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5 JANUARI s/d 30 DESEMBER 2022 Periode Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tanggal : 16 s/d 20 JANUARI 2024	
No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA		
U1	Persyaratan	3,46		
U2	Prosedur	3,46		
U3	Waktu Pelayanan	3,48		
U4	Biaya/Tarif	3,86		
U5	Produk Layanan	3,34		
U6	Kompetensi Pelaksana	3,53		
U7	Perilaku Pelaksana	3,46		
U8	Sarana dan Prasarana	3,36		
U9	Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan	3,76		

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN,
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KERJA KAMI
AGAR DAPAT TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN
KUALITAS PELAYANAN KAMI KEPADA MASYARAKAT

Tabel 3.2.4 Nilai Persepsi untuk IKM

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM (NI)	Nilai Interval Konversi IKM (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Jika dilihat dengan Pencapaian IKM DPMPTSP tahun 2024 bahwa “ **SANGAT BAIK** ” Yakni dengan Skor 91,68 atau dapat disajikan dengan tabel berikut ini.

Tabel 3.2.5 Rekapitulasi pencapaian Indikator Utama Untuk IKM

No	Nilai Interval IKM (NI)	Nilai Interval Konversi IKM (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	39,50	91,86	A	SANGAT BAIK

Selain dari IKM , faktor pendukung yang meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan investasi adalah perizinan dan investasi, yang akan membahas penyebaran data pelaku usaha yang sudah mendaftarkan perusahaannya pada aplikasi Online Single Submission, dapat dilihat dari data NIB serta nilai investasi usaha tersebut.

3 MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS NASIONAL.

Adapun data pendukung terkait evaluasi keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran capaian kinerja pada indikator persentase perencanaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tahun 2024 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini.



Tabel. 3.3.1. Evaluasi Keselaraan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

No	Sasaran	Indikator	Target RENSTRA			Realisasi		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Investasi dan Jumlah Pelaku Usaha	Realisasi Investasi	200.000.000.000,-	242.000.000.000	266.200.000.000	205.654.855.244	-	-
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan IKM	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	92,86	92,88	92,89	91,68	-	-

- Realisasi Investasi pada tahun 2024 sebesar Rp. 205.654.855.244,- dari target Rp. 200.000.000.000,- dengan capaian sebesar 103 % terjadi peningkatan realisasi investasi karena banyak pelaku usaha yang berinvestasi di Kota Bima baik yang PMA maupun PMDN dengan nilai milyaran.
- Untuk Realisasi IKM pada tahun 2024 sebesar 91,68 dari target 92,86 atau dengan nilai rata-rata sebesar 99 % dengan Kinerja Unit Pelayanan SANGAT BAIK.

4 MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL.

Dinas Penanaman modal dan PTSP, memiliki realisasi kinerja berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan BKPM No.5 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Yang akrab kita dengar yaitu LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal). Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan perkembangan kegiatan usaha, baik yang belum berproduksi/operasi komersial maupun yang sudah, yang mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya.



terkait pelaksanaan Penanaman Modal yang disampaikan oleh Pelaku Usaha orang perseorangan dan badan usaha secara daring melalui subsistem pengawasan pada sistem OSS.

Periode Pelaporan LKPM Adalah sebagai berikut :

- Bagi Pelaku Usaha kecil, LKPM disampaikan setiap 6 bulan (semester) :
Semester I : Pelaporan tanggal 1-10 Juli
Semester II : Pelaporan tanggal 1-10 Januari tahun berikutnya
- Bagi Pelaku Usaha menengah dan besar, LKPM disampaikan setiap 3 bulan (triwulan) :
 - Triwulan I : Pelaporan tanggal 1-10 April
 - Triwulan II : Pelaporan tanggal 1-10 Juli
 - Triwulan IV : Pelaporan tanggal 1-10 Januari tahun berikutnya

Dari hasil pelaporan yang dilakukan para pelaku usaha atau investor, memiliki realisasi investasi, dan Nilai realisasi investasi tersebut memiliki target dari BKPM / Kementerian Investasi untuk mengukur Realisasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP terkait pengawasan, pemantaun pada pelaku usaha/investor. Triwulan III : Pelaporan tanggal 1-10 Oktober



Tabel 3.4.1 Target dan realisasi capaian LKPM DPMPTSP Kota Bima berdasarkan target dari BKPM

Jumlah Target Dan Realisasi Investasi Kota Bima Tahun 2019-2023 Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

Target/Realisasi	Tahun												Ket
	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	
Target	65.050.913.516	258	281.426.257.002	71	20.106.558.639	475	119.771.847.405	202	200.000.000.000,-	192	200.000.000.000,-	103	
Realisasi	167.914.197.701		200.748.665.618		95.584.922.015		241.731.055.380		384.272.100.596		205.654.855.244,-		

5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.

Dari Sasaran strategis dan indikator kinerja utama DPMPTSP kota bima, berikut penjelasan terkait keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan sebagai berikut :

1. Indikator IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

Kegagalan :

Capaian kinerja IKM ditahun 2024 ditargetkan dengan Skor 92,86 dan terealisasi dengan Skor 91,68 atau sebesar 99 % Jika dilihat dari data tersebut capain kinerja pada tahun 2023 ternilai Tinggi karena mencapai angka 98 %, Jika dilihat dari capaian IKM dari dua tahun yang lalu, dapat dilihat memiliki variasi nilai yang berbeda-beda, karena tergantung dari penilain yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelayanan pada PTSP.

Alternative /solusi yang dilakukan :

1 Lebih ditingkatkan lagi terhadap pelayanan kepada masyarakat yang dapat nilai dari sembilan unsur pelayanan yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana, Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan.

2. Meningkatnya Investasi Daerah (realisasi Investasi)

Keberhasilan :

Capaian kinerja untuk meningkatnya investasi Daerah (Realisasi Investasi) dari tahun 2023 sampai tahun 2024 selalu mencapai target 100% dari yang ditentukan, hal ini berpengaruh banyak pelaku usaha yang memiliki usaha baru serta memperpanjang izin usaha yang sebelumnya.

6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Evaluasi kinerja dilakukan guna membandingkan keberhasilan dari setiap indikator kinerja terhadap sumber daya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pencapaian indikator-indikator tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis diperoleh sejumlah indikator yang realisasinya lebih dari atau sama dengan 100%, sehingga dapat diperhitungkan bahwa Capaian Kinerja dikatakan efisien apabila realisasi program lebih kecil dibanding realisasi kinerja.

Untuk mencapai target tiga indikator yang telah ditetapkan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima mengalokasikan belanja langsung tahun 2024 sebesar Rp 5.732.935.749,00-. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 5.194.646.023,00- atau 91 %. Dengan tingkat capaian rata-rata indikator Sasaran Strategis Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Bima sebesar 24,25 % hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Bima telah melakukan capaian kinerja secara efisien Sangat Tinggi (berhasil) dengan capaian diatas 100%.

Adapun perhitungan efisiensi anggaran disajikan seperti pada Tabel berikut :

Tabel. 3.6.1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran			% Capaian Kinerja	% Capaian Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2			3	4	5 (4:3)
1	Meningkatnya Investasi dan jumlah pelaku usaha	Realisasi Investasi	Pelaksanaan Kegiatan promosi Penanaman modal Daerah kabupaten/kota	100 %	99 %	99%
			Pengawasan penanaman modal	60 %	97 %	162 %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	220%	85 %	39 %
			Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	260 %	99%	38 %
			Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	8%	98%	12 %
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100 %	97%	97 %

Tabel. 3.6.2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya beserta program/kegiatannya

NO	Sasaran			% Capaian Penyerapan Kinerja	% Capaian penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)			-3	(4)	5(4:3)
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
			DINAS PENANAMAN MODAL			
			A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
a.			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	99.93	99%



1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	100	100,00
2			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	100	100,00
3			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100	100	100,00
4			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100	100	100,00
5			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100	100	100,00
6			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	100	100,00
7			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	99.54	99,54
b.			Administrasi Keuangan	100	95.71	95.71
1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	99,11	96.07
2			Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	100		87.75
3			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100	100	100,00
4			Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	100	100,00
c.			Administrasi Umum	100	99.48	99.48
1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	100	100,00
2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	100	100,00
3			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	100	100,00
4			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	100	100,00
5			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	99.27	99.27
d.			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100,00
1			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	100	100,00
e.			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	97.33	97.33
1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	100	100,00
2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	90.69	90.69
f.			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	98	98,00



1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	100	100,00
2			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	100	100,00
3			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	-	
			B. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	0	0	0
g.			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	0	0	0
1			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	0	0	0
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan IKM	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	C. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	130	97.11	97.11
h.			Pelayanan perizinan dan Non perizinan secara terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	130	97.11	97,11
1			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	130	95.87	95.87
2			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	122	100	100,00
3			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	97	99.62	96.62
4			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	0%	-	
		Meningkatnya Investasi Daerah (Realisasi Investasi)	D. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	100	93.29	93.29
i.			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota	100	93.29	93.29
1			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	-	
2			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	0	0
3			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	213	98.67	98.67
			E. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	100	99.96	99.96
j.			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota	100	99.96	99.96



1			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100%	99.96	100
---	--	--	---	------	-------	-----

7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN CAPAIAN PERNYATAAN KINERJA.

Dapat disajikan dalam tabel Capaian Kinerja Eselon II, III dan IV :

Tabel. 3.7.1. Capain Kinerja Eselon II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Targ et	Realisa si	Capain (%)						K e t
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Perizinan	I. Rata- rata IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	86,00	86,68	102%	112%	-	-			Be rha sil
2.	Meningkatny a Nilai Investasi	II. Persentase Peningkata n Nilai Investasi PMDN/PM A	10 %	32%	254%	318%	-	-			Be rha sil
		III. Porsentase Peningkata n Jumlah Investor PMDN/PM A	-	-	286%	-	-	-			Be rha sil
3	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Perizinan dan Investasi	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Perizinan dan investasi	-	-	-	-	100,80 %				Be rha sil
4	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Perizinan dan Investasi	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	88,86	87,12	-	-	-	98 %	98%	99 %	Be rha sil
		Meningkatnya Investasi Daerah (Realisasi Investasi)	Rp. 143.52 1.006, 828	Rp. 186.220. 708,499	-	-	-	130 %	192 %	103 %	Be rha sil



Tabel 3.7.2. Capaian Kinerja Eselon III

a. Sekretris

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)			Ket
						2022	2023	2024	
1		2		3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.	Persentase peningkatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	Berhasil
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan	2	Persentase peningkatan administrasi keuangan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	Berhasil
3	Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Umum	3	Porsentase Capaian Pelayanan Administrasi Umum	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	Berhasil
4	Meningkatnya kualitas Pengadaan peralatan dan Perlengkapan kantor	4	Persentase Peningkatan Pengadaan peralatan dan Perlengkapan kantor	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	Berhasil
5	Meningkatnya penyediaan jasa dalam menunjang kebutuhan kantor	5	Persentase peningkatan penyediaan jasa dalam menunjang kebutuhan kantor	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	Berhasil
6	Meningkatnya kualitas pemeliharaan Barang milik daerah	6	Persentase peningkatan pemeliharaan Barang milik daerah	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	Berhasil



Tabel 3.7.3. Capaian Kinerja Eselon IV

Saran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1		2	3	4	5	6
1.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang/bulan	26 orang/bulan	87 %	Berhasil
2	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100 %	Berhasil
3	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100 %	Berhasil
4	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	2 laporan	100 %	Berhasil
5	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	100 %	Berhasil
6	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	100 %	Berhasil
7	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	100 %	Berhasil
8	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	-	-
9	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	25 Laporan	100 %	Berhasil
10	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 UNIT	4 UNIT	100 %	Berhasil
11	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100 %	Berhasil

Kasubbag Umum

12	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	Berhasil
13	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	4 unit	100 %	Berhasil
14	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	4 unit	100 %	Berhasil
15	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	unit	-	-

Tabel 3.7.4. Capaian Kinerja Jabatan Fungsional

a.. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatnya Realisasi Usaha yang berizin	1. Persentase Peningkatan Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	100 %	100 %	100 %	Berhasil
2. Meningkatnya penerima fasilitas insentif	2. Porsentase peningkatan nilai investasi	100 %	100 %	100 %	Berhasil
3. Meningkatnya kerjasama investasi	3. Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	100 %	100 %	100 %	Berhasil
4. Meningkatnya Realisasi Investasi	4. Persentase Pelaku Usaha yang Telah Melaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	100 %	100 %	100 %	Berhasil

b. Penata Perizinan Ahli Madya

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3			
1. Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Penanaman Modal	1. Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	1000 Pelaku Usaha	2198 Pelaku Usaha	220%	Berhasil



c. Perencana Ahli Muda

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Ket
1		2		3			
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	Berhasil
2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Berhasil
3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Berhasil
4	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Berhasil
5	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Berhasil
6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100 %	Berhasil
7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100 %	Berhasil

d. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target
1		2	3			
1.	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8 Dokumen	8 Dokumen	100 %	Berhasil

e. Plt Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target
1		2	3			
1.	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Berhasil

2	Terlaksananya Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	2	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	231 Kegiatan usaha	138 Kegiatan usaha	60 %	Berhasil
---	--	---	---	--------------------	--------------------	------	----------

f. Penata Perizinan Ahli Muda

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6
1 Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha	2. Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1000 lembar izin	2.198 lembar izin	220 %	Berhasil

g. Penata Perizinan Ahli Muda

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3			
1. Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	1. Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	2000 Kegiatan usaha	5211 Kegiatan Usaha	261 %	Berhasil

h. Plt Penata Perizinan Ahli Muda

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3			
1. Tersedianya Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik dan Non Perizinan	1. Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Perizinan	25 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	8 %	Tidak Berhasil karena sudah banyak pelaku usaha yang sudah memahami pentingnya izin



B. REALISASI ANGGARAN

Selama Tahun Anggaran 2024, kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima dibiayai dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 5.732.935.749,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.194.646.023,- atau 90,61 %.

Adapun realisasi Belanja Langsung tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/	%
				(Kurang)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.732.935.749,00	5.194.646.023,00	538.289.726,00	90,61%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.732.935.749,00	5.194.646.023,00	538.289.726,00	90,61%
	DINAS PENANAMAN MODAL	5.732.935.749,00	5.194.646.023,00	538.289.726,00	90,61%
A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		4.164.450.649,00	3.829.707.036,00	334.743.613,00	91,96%
a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		102.884.200,00	97.370.850,00	5.513.350,00	94,64%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.802.100,00	16.802.100,00	0,00	100,00%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.161.000,00	9.161.000,00	0,00	100,00%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.502.500,00	9.502.500,00	0,00	100,00%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.121.700,00	4.121.700,00	0,00	100,00%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.857.200,00	3.857.200,00	0,00	100,00%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.464.000,00	24.951.650,00	5.512.350,00	81,91%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.975.700,00	28.974.700,00	1.000,00	100,00%
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.032.472.599,00	2.987.988.757,00	44.483.842,00	98,53%



1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.909.138.199,00	2.883.379.879,00	25.758.320,00	99,11%
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	108.947.500,00	90.315.000,00	18.632.500,00	82,90%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.530.700,00	8.437.700,00	93.000,00	98,91%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.856.200,00	5.856.178,00	22,00	100,00%
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah		433.758.300,00	390.372.015,00	43.386.285,00	90,00%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.164.000,00	2.164.000,00	0,00	100,00%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.715.000,00	48.746.600,00	12.968.400,00	78,99%
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.647.300,00	28.534.606,00	11.112.694,00	71,97%
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330.232.000,00	310.926.809,00	19.305.191,00	94,15%
d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		536.035.550,00	307.620.365,00	228.415.185,00	57,39%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	158.863.800,00	158.087.600,00	776.200,00	99,51%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	377.171.750,00	149.532.765,00	227.638.985,00	39,65%
e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		59.300.000,00	46.355.049,00	12.944.951,00	78,17%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.000.000,00	32.895.049,00	6.104.951,00	84,35%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.300.000,00	13.460.000,00	6.840.000,00	66,31%
B. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		57.481.100,00	57.201.180,00	279.920,00	99,51%
f. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		57.481.100,00	57.201.180,00	279.920,00	99,51%

1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	57.481.100,00	57.201.180,00	279.920,00	99,51%
C. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		1.302.588.500,00	1.106.240.057,00	196.348.443,00	84,93%
g. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		1.302.588.500,00	1.106.240.057,00	196.348.443,00	84,93%
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1.268.705.400,00	1.072.918.257,00	195.787.143,00	84,57%
2	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	19.677.100,00	19.316.800,00	360.300,00	98,17%
3	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	14.206.000,00	14.005.000,00	201.000,00	98,59%
D. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		133.924.000,00	129.409.590,00	4.514.410,00	96,63%
h. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		133.924.000,00	129.409.590,00	4.514.410,00	96,63%
1	Pengawasan Penanaman Modal	133.924.000,00	129.409.590,00	4.514.410,00	96,63%
E. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		74.491.500,00	72.088.160,00	2.403.340,00	96,77%
i. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		74.491.500,00	72.088.160,00	2.403.340,00	96,77%
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	74.491.500,00	72.088.160,00	2.403.340,00	96,77%

Dari tabel diatas sebagai mana tertera di atas dapat dijelaskan anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi atau program prioritas DPMPTSP adalah sebesar Rp. 1.568.458.100,-,- dengan rincian sebagai berikut :



- a. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL, sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dengan total anggaran sebesar Rp. 57.481.100,00-
- b. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL dengan Pelayanan perizinan dan Non perizinan secara terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dan sub kegiatann terbagi tiga sebagai berikut :
 - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik total anggaran Rp. 1.268.705.400,00,-
 - Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal total anggaran Rp. 14.206.000,00,-
 - Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Rp. 19.677.100,00,-
- c. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL dengan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota, dan sub kegiatan terbagi tiga sebagai berikut :
 - Pengawasan Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp. 133.924.000,00
- d. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota, sub kegiatan yaitu Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik total anggaran Rp. 74.491.500,00



BAB IV

PENUTUP

LKIP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKIP menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik

LKIP bagi Dinas PMPTSP Kota Bima juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas PMPTSP Kota Bima, dalam masa-masa awal implementasi sebagai Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bima, LKIP juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban tugas dan fungsi Dinas PMPTSP Kota Bima baik terhadap Walikota maupun kepada seluruh masyarakat Kota Bima.

A. KESIMPULAN

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2024), namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas PMPTSP Kota Bima pada tahun 2024 adalah sangat baik, karena 2 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas PMPTSP Kota Bima untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra dan Renja 2024, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga



pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk. dan berharap dengan adanya aplikasi Online Single Submission berbasis Resiko bisa lebih mengeratkan hubungan antar OPD teknis.

DPMPTSP Kota Bima masuk pada Misi RPD ke1 yaitu : Mewujudkan Kota Bima Yang Sejahtera, Maju dan Mandiri pada Tahun 2028. Adapun tujuan yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan tujuan yang telah disepakati tersebut dibuat sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis agar dapat dikelola pencapaiannya. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

Adapun Sasaran yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi.
2. Meningkatnya Tatakelola Pemeritahan yang baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka keterkaitan antara sasaran RPD dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima periode Renstra (2024-2026) sebagai berikut :

Tujuan, sasaran strategis, indikator Kinerja Utama dan Target OPD DPMPTSP :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi, sasaran Strategis meningkatnya Investasi dan jumlah pelaku usaha dengan indikator Realisasi Investasi target Rp. 200 Milyar, realisasi sebesar Rp. 205.568.696.946,- dengan capaian 103 %
2. Meningkatnya IKM Pelayanan Publik sasaran strategis adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan IKM dengan Indikator IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) target 92,86 realisasi 91,68 dengan capaian 99 %.

B. SARAN

Dari Sasaran strategis dan indikator kinerja utama DPMPTSP kota bima, berikut penjelasan terkait keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan sebagai berikut :

1. Realisasi Investasi

Capaian Kinerja Realisasi Investasi ini dari tahun sebelumnya selalu mencapai 100% dari target yang ditentukan hal ini berpengaruh banyak terhadap pelaku usaha yang mendirikan usaha baru serta memperpanjang izin usaha yang sebelumnya, walaupun di katakan berhasil tetap melakukan pelayanan yang maksimal untuk kenyamanan dan kepuasan pelaku usaha yang berinvestasi.

2. Indikator IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

Capaian kinerja IKM ditahun 2024 ditargetkan dengan Skor 92,86 dan terealisasi dengan Skor 91,68 atau sebesar 99 % Jika dilihat dari data tersebut capain kinerja pada tahun 2023 ternilai Tinggi karena mencapai angka 98 %, Jika dilihat dari capaian IKM dari dua tahun yang lalu, dapat dilihat memiliki variasi nilai yang berbeda-beda, karena tergantung dari penilaian yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelayanan pada PTSP.

Adapun alternative, solusi dan saran yang dilakukan adalah :

- b. Lebih ditingkatkan lagi terhadap pelayanan kepada masyarakat yang dapat nilai dari sembilan unsur pelayanan yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelakasana, Sarana dan Prasarana, Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan, sehingga visi dan misi kepala daerah tercapai sesuai dengan harapan.
- c. Meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur khususnya di bidang pelayanan penanaman modal melalui pendidikan dan pelatihan formal maupun non formal sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada pelaku usaha.
- d. Meningkatkan fungsi pengendalian penanaman modal di wilayah Kota Bima melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan pada pelaku usaha.



Sebagai bagian dari perbaikan kinerja organisasi perangkat daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan LKIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi sebagai pijakan dalam peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Kota Bima, Februari 2025
Kepala Dinas



H. LALU SUKARSANA, S.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 196607041986081003